



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KERTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA ,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Karanganyar, maka dipandang perlu Kecamatan tersebut dikembangkan menjadi 2 (dua) kecamatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Kecamatan Kertanegara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman pembentukan Kecamatan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KERTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Camat adalah Kepala Kecamatan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kertanegara.

2) Kecamatan Kertanegara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. Desa Kranglean;
- b. Desa Darma;
- c. Desa Langkap;
- d. Desa Adiarsa;
- e. Desa Karangasem;
- a. Desa Karangpucung;
- b. Desa Condong;
- c. Desa Kasih;
- d. Desa Karangtengah;
- e. Desa Kertanegara;
- f. Desa Mergasana.

- (3) Kecamatan Kertanegara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Karanganyar.

Pasal 3

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Kertanegara, maka nama Kecamatan Karanganyar tetap bernama Kecamatan Karanganyar.
- (2) Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Desa Ponjen;
 - b. Desa Buara;
 - c. Desa Brakas;
 - d. Desa Bungkel;
 - e. Desa Lumpang;
 - f. Desa Karanggedang;
 - g. Desa Kabunderan;
 - h. Desa Jambudea;
 - i. Desa Maribaya;
 - j. Desa Karanganyar;
 - k. Desa Banjarkerta;
 - l. Desa Kalijaran;
 - m. Desa Kaliori.

B A B III PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kertanegara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berada di Desa Kertanegara.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini tetap berada di Desa Karanganyar.

B A B IV BATAS KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Batas Kecamatan Kertanegara dan batas Desa-desanya dalam Kecamatan Kertanegara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas Kecamatan Karanganyar dan batas Desa-desanya dalam Kecamatan Karanganyar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Batas Kecamatan Kertanegara dan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam wilayah Kabupaten Purbalingga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Selama Kecamatan Kertanegara belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani Kecamatan Karanganyar, dan dibawah tanggungjawab Camat Karanganyar.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Januari 2002

BUPATI PURBALINGGA ,

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KERTANEGARA

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta dalam upaya pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia khususnya di Kecamatan Karanganyar, perlu diadakan pengembangan Kecamatan.

Bahwa sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Karanganyar yang secara geografis dan topografis memiliki wilayah yang luas dan potensial, untuk lebih memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan tersebut perlu dikembangkan menjadi 2 (dua) Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

L PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

asal 1	: Cukup jelas.
asal 2	: Cukup jelas.
asal 3	: Cukup jelas.
asal 4	: Cukup jelas.
asal 5	: Cukup jelas.
asal 6	: Cukup jelas.
asal 7	: Cukup jelas.
asal 8	: Cukup jelas.
asal 9	: Cukup jelas.